

**AKUNTABILITAS PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA MENUJU
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS
(STUDI KASUS KABUPATEN PAMEKASAN)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
ACH ZUBAIRI
NIM. 02040242001

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ach Zubairi
Nim : 02040424001
Program : Magister (S-2)
Prodi : Program Studi Hukum Tata Negara
Institusi : UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian yang berbentuk tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Desember 2025



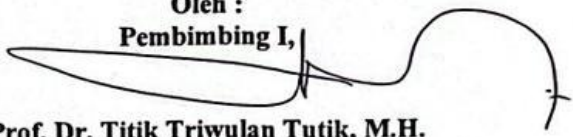
a yang menyatakan

Ach Zubairi
02040424001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

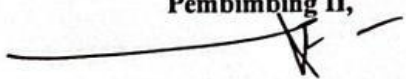
Tesis berjudul akuntabilitas pengawasan pemilihan kepala desa menuju tata kelola pemerintahan desa yang demokratis (studi kasus kabupaten pamekasan) yang ditulis oleh Ach Zubairi ini telah disetujui pada Tanggal Oktober 2025

Oleh :
Pembimbing I,



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.
NIP. 19680329300003201

Pembimbing II,



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I, M.S.I.
NIP.197911052007011019

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Ach. Zubairi, NIM. 02040424001 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, pada hari ini tanggal 06 Januari 2026 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Pascasarjana Strata Dua dalam Prodi Magister Hukum Tata Negara.

Majelis Sidang Munaqasah:

Ketua Penguji

Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, M.H

NIP. 196803292000032001

Sekretaris Penguji

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I, M.S.I.

NIP.197911052007011019

Penguji I

Dr. H. Muwahid, S.H, M.Hum.

NIP.197803102005011004

Penguji II

Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H., M.Hum

NIP.196602122007011049

Surabaya, 06 Januari 2026

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. H. Saifuddin Musafa'ah, M.Ag.

NIP.19503271999032001

PERNYATAAN PUBLIKASI
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ACH ZUBAIRI
NIM : 02040424001
Fakultas/Jurusan : MEGISTER HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : achzubairi123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Desember 2025



(Ach zubairi)

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan manifestasi demokrasi di tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan Indonesia. Penelitian ini menganalisis akuntabilitas pengawasan Pilkades di Kabupaten Pamekasan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis. Permasalahan utama yang dikaji adalah implementasi sistem pengawasan Pilkades dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mekanisme pengawasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pengawasan Pilkades di Kabupaten Pamekasan memiliki struktur berjenjang melibatkan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) di tingkat kabupaten hingga Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) di tingkat desa. Namun, sistem ini menghadapi hambatan fundamental berupa: (1) kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam regulasi pengawasan yang tidak mengatur secara jelas lembaga pengawas independen, (2) dualisme fungsi PPKD sebagai penyelenggara sekaligus pengawas yang bertentangan dengan prinsip *checks and balances*, (3) keterbatasan kapasitas dan independensi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan, (4) minimnya partisipasi masyarakat akibat rendahnya pengetahuan tentang hak-hak politik dan ketiadaan mekanisme pelaporan pelanggaran yang jelas. Dualisme fungsi PPKD menciptakan konflik kepentingan struktural yang menghambat objektivitas pengawasan dan membuka celah terjadinya berbagai pelanggaran seperti *money politics*, manipulasi daftar pemilih, dan intervensi elite lokal. Kondisi ini diperparah dengan budaya paternalistik dan pengaruh patronase yang masih kuat dalam masyarakat Madura. Ketidadaan lembaga pengawas eksternal yang setara dengan Bawaslu menyebabkan pelanggaran tidak dapat ditindak secara optimal, sehingga legitimasi hasil Pilkades menjadi dipertanyakan dan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan yang mengancam stabilitas sosial dan pembangunan desa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi komprehensif melalui: (1) revisi regulasi untuk membentuk lembaga pengawas Pilkades yang independen dan terpisah dari fungsi penyelenggaraan, (2) penguatan kapasitas dan independensi BPD dalam fungsi pengawasan, (3) peningkatan transparansi dan akuntabilitas pembentukan panitia pemilihan, (4) pengembangan mekanisme partisipasi dan perlindungan masyarakat dalam pengawasan. Reformasi ini penting untuk mewujudkan Pilkades yang kredibel, demokratis, dan akuntabel sebagai fondasi penguatan demokrasi lokal di Indonesia.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengawasan Pilkades, Dualisme Fungsi, Demokrasi Desa, Checks and Balances, Kabupaten Pamekasan

ABSTRAK

The Village Head Election (Pilkades) is a manifestation of democracy at the lowest level in the Indonesian government structure. This study analyzes the accountability of Pilkades supervision in Pamekasan Regency as an effort to realize democratic village governance. The main problem studied is the implementation of the Pilkades supervision system and the obstacles faced in the supervision mechanism according to the applicable laws and regulations. The results of the study indicate that the implementation of the Pilkades supervision system in Pamekasan Regency has a tiered structure involving the Regency Election Committee (PPK) at the regency level to the Village Head Election Committee (PPKD) at the village level. However, this system faces fundamental obstacles in the form of: (1) a legal vacuum (*rechtsvacuum*) in the supervision regulations that do not clearly regulate independent supervisory institutions, (2) the dualism of the PPKD's function as both organizer and supervisor which is contrary to the principle of checks and balances, (3) limited capacity and independence of the BPD in carrying out its supervisory function, (4) minimal community participation due to low knowledge of political rights and the absence of a clear mechanism for reporting violations. The dual function of the Village Election Supervisory Agency (PPKD) creates structural conflicts of interest that hinder the objectivity of oversight and open up opportunities for various violations, such as money politics, voter list manipulation, and local elite intervention. This situation is exacerbated by the paternalistic culture and the persistent influence of patronage in Madurese society. The absence of an external supervisory body equivalent to the Election Supervisory Agency (Bawaslu) prevents violations from being effectively addressed, questioning the legitimacy of the village head election results and potentially leading to prolonged conflict that threatens social stability and village development. This study recommends comprehensive reforms through: (1) revising regulations to establish an independent village head election supervisory body separate from the election administration function; (2) strengthening the capacity and independence of the Village Consultative Body (BPD) in its supervisory function; (3) increasing transparency and accountability in the formation of election committees; and (4) developing mechanisms for public participation and protection during oversight. These reforms are crucial for realizing credible, democratic, and accountable village head elections as a foundation for strengthening local democracy in Indonesia.

Keywords: Accountability, Village Head Election Supervision, Dual Function, Village Democracy, Checks and Balances, Pamekasan Regency

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
1. Teoritis	6
2. Praktis	7
F. Literatur Review	8
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Sumber Bahan Hukum	12
4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum	13
H. Analisis Bahan Hukum Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEEORI.....	15
1. Teori Negara hukum.....	15
2. Teori kedaulatan rakyat.....	19
3. Toeri otonomi daerah	25
BAB III PEMBAHASAN.....	32
1. Profil penelitian	32
2. Kondisi social dan budaya.....	34
3. Kondisi ekonomi kabupaten pamekasan	35
4. Pengawasn pemilihan kepala desa	36
5. Implementasi peraturan bupati tengang pengawasn kepala desa	48
BAB IV HAMBATAN DALAM MEKANISME PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA.....	55
1. Kekosongan regulasi dalam mekanisme pengawasn pilkades	55
2. Stuktur dan kelembagaan pilkades	62
3. Mekanisme pembentukan panitia pilkades.....	75
4. Dualism fungsi panitia pilkades	85
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR PUSTAKA.

BUKU

- Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 4.
- 2, No 3 Juni 2017), h. 27
- A. Ahsin Thohari, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Konteks NKRI 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 234-237
- A.W. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 198-205.
- Agus Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 213-218.
- Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, (Bandung: Alumni, 2006), hlm.45.
- Astim Riyanto, “Negara Kesatuan : Konsep Asas dan Aktualisasinya” (Bandung : Yapemdo, 2006), hlm 41-42
- Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas, (Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2009), Halaman 128.
- Didik Supriyanto, Mengawasi Pemilihan Umum, (Jakarta: Perludem, 2007), hal. 67-70
- Edward Aspinall and Mada Sukmajati, Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots, (Singapore: NUS Press, 2016), hal. 34-38
- Erwin Muhammad, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 130.
- Bagir Ma nan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2004), hlm. 241.
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2004), hlm. 223.
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001), hlm. 46-47.
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001), hlm. 112-118.
- Philipus M. Hadjon and Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011). 7
- Philipus M. Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*”, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987), 76.
- Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan
- Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. (Jakarta: PT Rafika Aditam, 1999) 360.
- Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 156.

- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 183.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 89-92.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 156-158.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 145-148
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2007), 312.
- Hario Mahar Mitendra. "Fenomena Dalam Kekosongan Hukum". *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 1 (2018), 1-3
- Harjono, *Transformasi Demokrasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2009, hlm. 19.
- Harjono, *Transformasi*. Op. Cit., hlm. 24.
- Haw Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 78.
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 145-148.
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 89-92
- HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 234-241.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 266-267.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 287.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 295.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 307.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 234-238.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 182-185.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 87.
- Norris Pippa, *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), hlm. 112-128.

JURNAL:

- Ahmad Averus dan Dinda Alfina, "Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa" 6 (2020): 587, <http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i3.3996>.
- Aidul fitriciada Azhari. "Menemukan Demokrasi." Surakarta. Penerbit Universitas Muhammadiyah. 2005. Hal. 2
- Aldi Lutfi, Zufar Hafiz, Ilham Maulana, Fatkhur "Peran BAPEMDA dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Banjarnegara" Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah Vol. 22, No. 2, Desember 2024, hal. 161–168 <https://ejournal.jatengprov.go.id/index.php/jurnaljateng/article/view/1250>
- Alfrid Jaya Sentosa dkk. Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- Alfrid Sentosa "Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak" Universitas PGRI Palangka Raya, Indonesia <https://orcid.org/0000-0002-3652-8531>
- Andi Erwan, Eka Suaib, Arifin Utha. "Analisis Kebijakan Pengawasan Terhadap Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka". *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*. Vol. 13, No. 1, (Februari, 2022), 30
- Andi Erwan, Eka Suaib dan Arifin Utha "Analisis Kebijakan Pengawasan Terhadap Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka" Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol. 13 No. 1 Februari 2022 <https://journal.uho.ac.id/index.php/publica/article/download/60/30/179>
- Andrianto Prabowo, Tri Astuti Handayani, "Tinjauan Hukum: Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa", Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol. 5, No. 1, April 2024, hal. 112
- Antje Missbach, "The Long Way to Democracy: Direct Elections in Indonesian Villages", *South East Asia Research*, Vol. 18, No. 1, 2010, hal. 77-106
- Azallea Ramadhani, Devi, dkk. "Sistem Pemilihan Kepala Desa di Indonesia dalam Hukum Administrasi Negara". *Jurnal of Public Administration*, Vol. 2, No. 4 (2025), 1-2
- Azallea Ramadhani, Devi, dkk. "Sistem Pemilihan Kepala Desa di Indonesia dalam Hukum Administrasi Negara", 3-4
- Bambang Hermoyo, Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Jurnal Hukum
- Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, "Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu," Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol. 5, No. 2, 2012, hlm. 45-62.
- Gerry van Klinken and Edward Aspinall, "Building Relations: Corruption, Competition and Cooperation in the Construction Industry", in Edward Aspinall and Gerry van Klinken (eds), *The State and Illegality in Indonesia*, (Leiden: KITLV Press, 2011), hal. 139-163
- Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.

- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 398.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 432.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 76-81
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 314-316
- Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67-68.
- Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1996), hal. 11-15
- Jurnal Sociopolitico, Volume 3 Nomor 1, Pebruari 2021. hlm 44
- Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), hlm. 221-238.
- Laurensius Arliman S. "Kekosongan Hukum Terhadap Sosialisasi Pemilihan Legislatif Dan Pemilihan Presiden Yang Berkedok Kampanye". *Journal of Global Legal Review*, Vol. 1, No. 2 (2023), 4
- M. Makmur, Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, (Bandung, PT. Rafika Aditama, 2011), 176.
- M. Manullang, Dasar-dasar Management, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), 136.
- M. Mas'ud Said, "Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 4, No. 4, 2007, hlm. 127-145
- M. Syaiful Aris, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mendorong Demokratisasi Pemerintahan Desa", Center for Security and Welfare Studies FISIP Unair, 2018, Halaman 8-12.
- M. Syaiful Aris, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mendorong Demokratisasi Pemerintahan Desa", Center for Security and Welfare Studies FISIP Unair, 2018, Halaman 10.
- Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024). 167
- Makmur, Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, (Bandung, PT. Rafika Aditama, 2011), 176.
- Marcus Mietzner, "Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia", *Pacific Affairs*, Vol. 91, No. 2, 2018, hal. 261-282
- Marcus Mietzner, Money, Power and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia, (Honolulu: University of Hawaii Press, 2013), hal. 156-160
- Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), hlm. 178-186.
- Marwandianto dan Helmi Ardani Nasution, "Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekrupsi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP, dalam Jurnal "Jurna Ham"", Vol. 11, Nomor, 1 April 2020, hlm. 2
- Miftahul Huda "Kajian Yuridis Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- Tentang Desa” *Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Miftahul Huda, Djoko Purwanto, "Kajian Yuridis Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember*, 2021, hal. 12
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 245-249.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 171-173
- Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung :P.T Alumni . 2000) hal 17
- Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung :P.T Alumni . 2000) hal 17
- Moh. Mahfud MD, "Pengawasan Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Demokrasi Lokal," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2 (2014), hlm. 312.
- Mohammad Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 167-174.
- Muhammad Amin, 2012, *kebijakan pemberian dana alokasi umum Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan peraturan Presiden nomor 6 tahun 2011 Tentang dana alokasi umum daerah provinsi kabupaten/kota tahun 2011*, Tesis Surakarta, Pascasarjana UNS.
- Neneng Yani Yuningsih, Valina Singka Subekti, “Demokrasi dalam pemilihan kepala desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013”, *Jurnal politik*, Vol.1 : Iss. 2, Article 2. (September 2015), 2.
- Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, 67.
- Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, 30.
- Pradana Widhi Saputra, Khairul Umam. “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah”. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*. Vol. 5, No. 1 (2023), 1
- PTUN Manado, "Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Teori Konflik dan Teori Motivasi", diakses dari <https://ptun-manado.go.id/>, pada tanggal 10 September 2025.
- R. Siti Zuhro, *Demokrasi Lokal : Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, Ombak, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.
- R. William Liddle and Saiful Mujani, "Indonesia: Personalities, Parties, and Voters", *Journal of Democracy*, Vol. 21, No. 2, 2010, hal. 35-42
- Rahadjo Adisasmitha, *Pengelolaan Pendapatan Daerah*, Graha Ilmu Bandung, 2010, 15.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 189-193.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 198-201
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Reviana Mutiara Indah, Irwan Triadi. "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma". *Media Hukum Indonesia* Vol. 3, No. 4 (Oktober, 2025), 112

Rifka Agustianti and Pandriadi, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Makassar: Tohar Media, 2022). 189

Robert A. Dahl, *On Democracy*, (New Haven: Yale University Press, 2000), hlm. 85-89. [Edisi terjemahan: Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 85-89].

Robert A. Dahl, *On Democracy*, (New Haven: Yale University Press, 1998), hal. 85-89

Robert H. Jackson, *Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third World*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 156-163.

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 234.

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 241.

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 156-159.

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 234-237.

Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2000), hlm. 134.

S.H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 89.

Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 198.

Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 203.

Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 212.

Sarip Sarip, Fahmi Fajar Mustopa, Aip Syarifudin, Multahibun Multahibu "Mengurai Dilema Hukum Badan Pegawai Pemilu Untuk Pengawasan Pemilihan Kepala Desa" jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 2 (2022) <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/8492>

Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 93.

Seperti dikutip dalam Sopi. 2013 Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya Bandung. Hlm.17

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 267-270.

- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM-HUMA, 2002), hal. 267-271
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 211-215.
- Subhan, A. *Pengawasan Pemilihan Kepala Desa di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2020
- Sulardi. "Reformasi Hukum Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat Dalam Membangun Demokrasi". Malang. Penerbit In-TRANS Publishing 2009..Hal.7
- Sunarto, "Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 2, 2016, Halaman 157-163.
- Sunil Bastian dan Robin Luckham (Edt), "Can Democracy be Designed?, The Politics of Institutional Choice in Conflict-torn Societies", London&Newyork: Zed Books, 2003, h.15
- Supriady Bratakusumah dan Deddy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 198-201.
- Supriyadi A Arief "Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa Terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa" *Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Soedirman No.6 Kota Gorontalo* <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1946/>
- Sutoro Eko, "Masa Depan Otonomi Desa: Pelajaran dari Hubungan Desa-Negara di Era Orde Baru," dalam *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 9, No. 1, 2004, hlm. 23-45.
- Sutoro Eko, "Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa", *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 8, No. 1, 2003, hlm. 15-35.
- Sutoro Eko, *Masa Depan Otonomi Desa: Pelajaran dari Desa-desa Lama dan Desa-desa Baru*, (Yogyakarta: IRE Press, 2014), hal. 156-158
- Syarif Hidayat, "Demokrasi Lokal di Indonesia: Antara Kenyataan dan Tantangan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, 2008, hlm. 45-62.
- Syaukani, Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 145-147.
- Tjahyo Kumolo, *Menelisik Sejarah Otonomi Daerah*, Jakarta : Litbang Kemendagri, Vol
- Topo Santoso, *Masa Depan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 123-126
- Tri Dwi Sulisworo, Dkk, *Demokrasi*, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012), 3.
- Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: penerbit Rineka Cipta, 1994), cet-1, 20.
- W.Friedmann , *Teori dan Filsafat Hukum* . Penerjemah : Muhammad Arifin (Jakarta: Rajawali 1990 Hal.43)
- Wawan Sobari dan Ida Kurnia, "Model Pengawasan Pemilihan Kepala Desa: Studi di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 234-251.

PERATURA PERUNDANG UNDANGAN

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 Pasal 18B Ayat (2)) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021
 Peraturan Bupati Pamekasan No. 10 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (10).
 Peraturan Bupati Pamekasan No. 10 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (2)
 Peraturan Bupati Pamekasan No. 10 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (3).
 Peraturan Bupati Pamekasan No. 48 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (1) huruf f
 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
 Pasal 1 ayat (7).
 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
 Pasal
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 9
 Peraturan Pemerintah (PP) No 47 Tahun 2015
 Undang-Undang Dasar 1945
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 37 ayat (6)
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024
 Indonesia, Undang-Undang tentang Desa, UU No. 6 Tahun 2014, LN No. 7 Tahun
 2014, TLN No. 5495, Pasal 33.

WAWANCARA

Hasil Wawancara Anggota Bpd. Pamekasan. samheji.
 Hasil Wawancara Anggota Bpd. Pamekasan. samheji.
 Hasil Wawancara Anggota Bpd. Pamekasan. samheji.
 Hasil Wawancara Anggota Bpd. Pamekasan. samheji.
 Hasil Wawancara Anggota DPMD. Pamekasan. Fendi hermawan
 Hasil Wawancara Anggota DPMD. Pamekasan. Fendi hermawan
 Hasil Wawancara Anggota DPMD. Pamekasan. Fendi hermawan
 Hasil Wawancara Anggota DPMD. Pamekasan. Fendi hermawan
 Hasil Wawancara Anggota DPMD. Pamekasan. Fendi hermawan
 Hasil Wawancara DPMD. Pamekasan. Fendi hermawan
 Hasil Wawancara Kepala desa blumbungan Kab. Pamekasan. Ferry andrianto alvin
 Hasil Wawancara Kepala desa blumbungan Kab. Pamekasan. Ferry andrianto alvin
 Hasil Wawancara Kepala desa sumber waru Kab. Pamekasan. Suparma
 Hasil Wawancara Kepala desa sumber waru Kab. Pamekasan. Suparma
 Hasil Wawancara Kepala desa sumber waru Kab. Pamekasan. Suparma
 Hasil Wawancara Kepala desa sumber waru Kab. Pamekasan. Suparma
 Hasil Wawancara Ketua DPRD Kab. Pamekasan. Ali masykur.
 Hasil Wawancara Ketua DPRD Kab. Pamekasan. Ali masykur.
 Hasil Wawancara Ketua DPRD Kab. Pamekasan. Ali masykur.
 Hasil Wawancara Ketua DPRD Kab. Pamekasan. Ali masykur.
 Hasil Wawancara Ketua DPRD Kab. Pamekasan. Ali masykur.

Hasil Wawancara Ketua DPRD Kab. Pamekasan. Ali masykur.

Hasil Wawancara ketua DPRD kabupaten pamekasan

Hasil Wawancar dengan ketua DPRD Kabupaten pamekasan, ali masykur

Hasil Wawancar dengan ketua DPRD Kabupaten pamekasan, ali masykur

Hasil Wawancar dengan ketua DPRD Kabupaten pamekasan, ali masykur

Hasil Wawancara dengan Kabid Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Fendi hermawan

Hasil Wawancara dengan Masyarakat atau pemilih. khoiruddin

Hasil Wawancara dengan Masyarakat atau pemilih. khoiruddin

Hasil Wawancara dengan Masyarakat atau pemilih. khoiruddin

Hasil Wawancara dengan Masyarakat atau pemilih. Rudiyanto

Hasil Wawancara dengan Masyarakat atau pemilih. Rudiyanto

Hasil Wawancara dengan Masyarakat atau pemilih. Rudiyanto

Hasil Wawancara dengan Masyarakat atau pemilih. Rudiyanto

Hasil Wawancara dengan Masyarakat atau pemilih. Rudiyanto

WEBSET

Kabupaten pamekasan dalam Angka 2023. BPS Pamekasan.

Kabupaten pamekasan dalam Angka 2025. BPS Pamekasan.

Kabupaten pamekasan dalam Angka 2025. BPS Pamekasan.

Kabupaten pamekasan dalam Angka 2025. BPS Pamekasan.

Kabupaten pamekasan dalam Angka 2025. BPS Pamekasan.

Kabupaten pamekasan dalam Angka 2025. BPS Pamekasan.

Kabupaten pamekasan dalam Angka 2025. BPS Pamekasan.

<https://pamekasankab.go.id/kondisi/geografis>

<https://pamekasankab.go.id/kondisi/geografis>

<https://pamekasankab.go.id/kondisi/geografis>

<https://pamekasankab.go.id/kondisi/geografis>